



## KONFLIK ANTAR ETNIS DI TANAH GAYO: TINJAUAN INTERAKSI SOSIAL ANTAR ETNIS JAWA DAN ETNIS ACEH TAHUN 1989-2015

Nanda Winar Sagita, Mawardi Umar, Zainal Abidin AW  
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala

---

---

### ABSTRAK

*Dalam konteks Aceh, kekerasan kultural tidak bisa dipisahkan dari kekerasan struktural. Artinya, kekerasan politik juga menggiring kepada kekerasan yang terjadi karena perbedaan etnis, agama dan bahasa. Salah satu daerah yang berpotensi besar menjadi tempat munculnya konflik semacam itu adalah Aceh Tengah. Di wilayah ini setidaknya terdapat 3 etnis yang dominan dengan akar kebudayaan yang sangat jauh berbeda, yaitu Gayo, Aceh dan Jawa. Penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana interaksi sosial masyarakat pra-konflik, proses terjadinya konflik, dan dampaknya terhadap masyarakat di kampung Gayo Murni pasca-konflik terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hubungan sosial antara masyarakat sebelum terjadinya konflik, proses dan periodisasi konflik yang sedang berlangsung, dan dampak terhadap masyarakat setelah konflik terjadi di Kampung Gayo Murni. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yakni wawancara dengan informan, dokumentasi pada arsip kampung dan surat kabar, dan observasi langsung ke Kampung Gayo Murni. Informan dalam penelitian ini meliputi Sarak Opat serta warga dari etnis Jawa, etnis Aceh, dan etnis Gayo yang berdomisili di kampung tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan sejarah kritis dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa interaksi sosial antara etnis di Kampung Gayo Murni sebelum terjadinya konflik masih berjalan baik dan harmonis karena kampung tersebut masih dalam proses pembangunan yang seiring dengan kedatangan etnis Jawa melalui program transmigrasi. Konflik mulai terjadi ketika Pemerintah RI menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 2003. Konflik berlangsung dalam dua periode, yang pertama dalam kurun waktu 2003-2005 dan yang kedua dalam kurun waktu 2005-2008. Konflik tersebut berdampak besar pada kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Kampung Gayo Murni.*

**Kata Kunci:** *Konflik, Etnis, Kampung Gayo Murni*

---

---

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara heterogen yang terdiri dari berbagai macam etnis, agama dan bahasa. Keanekaragaman ini tidak hanya menjadi ciri khas yang mencerminkan eksistensi suatu bangsa multikultural, tetapi juga menyebabkan terjadinya perbenturan budaya yang sangat krusial antara satu

golongan dengan golongan yang lain. Misbah Zulfa Elizabeth (dalam Musahadi HAM, 2007:12-13) menyatakan bahwa di dalam ruang lingkup kemajemukan, stereotype dan prasangka berkembang secara tidak terbatas sehingga dapat memunculkan konflik antara dua kelompok yang sedang berinteraksi. Hal ini disebabkan karena setiap kelompok



memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang berbeda dari kelompok lainnya.

Menurut Johan Galtung (dalam Novri Susan, 2010:119) munculnya konflik antara kelompok disebabkan karena satu pihak merasakan adanya ancaman pada kelestarian, kesejahteraan, kebebasan dan identitasnya. Ancaman yang datang bisa berupa kekerasan struktural atau kekerasan kultural dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Dalam konteks Aceh, kekerasan kultural tidak bisa dipisahkan dari kekerasan struktural. Artinya, kekerasan politik juga menggiring kepada kekerasan yang terjadi karena perbedaan etnis, agama dan bahasa. Salah satu daerah yang berpotensi besar menjadi tempat munculnya konflik semacam itu adalah Aceh Tengah. Di wilayah ini setidaknya terdapat 3 etnis yang dominan dengan akar kebudayaan yang sangat jauh berbeda, yaitu Gayo, Aceh dan Jawa (Chairul Fahmi, 2014a:22).

Ditinjau dari asal-usulnya, ketiga etnis tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu etnis asli dan etnis pendatang. Sebagai penduduk asli, sampai saat ini etnis Gayo masih menjadi mayoritas. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada sensus penduduk terakhir yang dilaksanakan tahun 2010-2011, jumlah etnis Gayo mendominasi sekitar 60% dari jumlah keseluruhan penduduk yang mendiami wilayah Aceh Tengah. Di samping itu, persentase kedua etnis lain, selaku pendatang, adalah 30% untuk etnis Jawa dan 5% untuk etnis Aceh. Selebihnya adalah gabungan dari berbagai macam etnis seperti Batak, Tionghoa, Padang dan lain-lain (Chairul Fahmi, 2014b:13).

Lebih tingginya jumlah etnis Jawa ketimbang etnis Aceh di wilayah Aceh Tengah adalah suatu fenomena yang unik. Hal ini berkaitan dengan diferensiasi arus kedatangan kedua etnis tersebut. Menurut T. A. Hasan Husin (1980:16), orang Jawa untuk pertama kalinya datang dalam jumlah besar ke dataran tinggi Gayo adalah pada masa pemerintahan Hindia Belanda di awal abad ke-20. Mereka dibawa secara berkelompok oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk dipekerjakan sebagai buruh, atau yang lebih populer disebut sebagai Jawa Kontrak. Pada mulanya, mereka dipekerjakan di perkebunan-perkebunan teh di Kampung Janarata Kecamatan Bebesen, perkebunan-perkebunan damar di Isaq dan Lampahan serta perkebunan-perkebunan kopi di Pondok Baru. Setelah masa kontraknya habis, kebanyakan dari mereka tidak mau kembali ke daerah asalnya dan memilih untuk menetap. Akibatnya, sebelum program transmigrasi dijalankan oleh Pemerintah Orde Baru pada dekade 1970-1980-an, diaspora pemukiman Jawa sudah dapat ditemukan di beberapa daerah seperti Kecamatan Jagong Jeget, Atu Lintang (sebelumnya kedua kecamatan itu masih bergabung dengan Kecamatan Linge) dan Silih Nara.

Di sisi lain, kedatangan etnis Aceh ke wilayah Aceh Tengah lebih didorong oleh berbagai macam faktor yang bersifat privasi, seperti kepentingan bisnis dan ikatan perkawinan (T. A. Hasan Husin, 1980:19). Arus kedatangan yang tidak terstruktur ini menyebabkan para sejarawan mengalami kesukaran untuk menentukan secara pasti perihal waktu datangnya orang Aceh ke Tanah Gayo, namun diperkirakan peristiwa



itu sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Hal ini dapat ditilik dari situasi politik dan keadaan ekonomi yang memungkinkan pada waktu itu. Umumnya, orang-orang Aceh tersebut berprofesi sebagai pedagang dan menetap di sekitaran kota, meskipun tidak sedikit pula yang tinggal di perkampungan. Seiring dengan diberlakukannya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh sejak tahun 1989, isu anti-jawa yang mulanya berkembang pesat di wilayah Aceh pesisir, mulai merebak ke wilayah Aceh Tengah. Hal ini menyebabkan interaksi antara etnis yang awalnya terjalin harmonis menjurus ke arah yang negatif.

Di Kabupaten Aceh Tengah, daerah yang menjadi titik rawan terjadinya konflik tersebut adalah Kampung Gayo Murni yang terletak di Kecamatan Atu Lintang. Di kampung tersebut, hampir separuh dari jumlah penduduknya adalah orang Jawa, sehingga tidak terlepas dari pengaruh milisi yang sangat kuat. Di samping itu, orang Aceh yang jumlahnya paling sedikit dianggap sebagai penyebar ide separatisme sehingga mendapatkan ancaman dan pengusiran yang berujung pada penculikan, pembantaian, dan pembakaran rumah.

Sisi yang menarik dari peristiwa ini adalah pertikaian yang terjadi justru melibatkan langsung etnis-etnis pendatang yang menjadi minoritas, sedangkan posisi etnis asli dalam konflik tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut, antara berpihak kepada kelompok tertentu atau bersikap netral.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang sesuai untuk dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penulis ingin meninjau kembali

tentang eksistensi dan interaksi sosial etnis Jawa dan etnis Aceh sejak kedatangan mereka ke Kampung Gayo Murni di akhir dekade 1980-an hingga pada saat ini. Menurut Helius Sjamsuddin (2007:17) metode sejarah kritis menggunakan beberapa langkah, yakni Heuristik, Kritik (meliputi kritik eksternal dan internal), dan Historiografi (dengan melakukan penafsiran, penjelasan dan penyajian).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif. Hal ini dikarenakan objek yang akan dikaji memiliki fenomena yang dapat diungkapkan oleh peneliti. Fenomena yang dimaksud adalah realitas sosial yang melibatkan tindakan manusia dengan menggambarkan struktur dan pranata sosial (Burhan Bungin, 2007:83).

Adapun proses pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu; (1) Wawancara, teknik ini dilakukan dengan proses wawancara pada pelaku dan saksi yang menyaksikan langsung peristiwa yang terjadi. Hal ini dikarenakan peristiwa yang terjadi dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk sejarah yang diingat secara kolektif oleh masyarakat (Bernard Lewis, 2009:11); (2) Dokumentasi; dan (3) Observasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kampung Gayo Murni**

Kampung Gayo Murni adalah salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah dengan luas wilayah 475 Ha Berdasarkan letak geografisnya, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Meurah Jernang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung



Meurah Muyang, di sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kepala Akal, dan di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Damar Mulyo (sumber: dokumen Kampung Gayo Murni).

Sebelum menjadi kampung yang mandiri, Gayo Murni merupakan bagian dari Kampung Meurah Muyang. Hal ini berlaku juga dengan Kecamatan Atu Lintang yang sebelumnya juga masih bersatu dengan Kecamatan Linge. Seiring dengan proses pemekaran wilayah yang didasarkan pada Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 tahun 2006, Kecamatan Atu Lintang memisahkan diri dari Kecamatan Linge. Meskipun demikian, Kampung Gayo Murni resmi menjadi kampung yang terpisah dari Kampung Meurah Muyang sudah sejak tahun 2002 (wawancara dengan Saladin, 7 Mei 2016).

Secara administratif, Kampung Gayo Murni terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Genap Mupakat, Sari Murni, Medang Jempa, dan Arami Sari. Jumlah penduduk yang menempati Kampung Gayo Murni sampai tahun 2015 adalah 448 jiwa, yang mana terdiri dari 122 kepala keluarga (KK) dengan jumlah laki-laki adalah 241 dan perempuan 207 (sumber: dokumen Kampung Gayo Murni). Semua penduduk di Kampung Gayo Murni beragama Islam. Namun jika ditilik dari sisi etnis, orang Jawa adalah yang paling dominan.

### **Bentuk Interaksi Sosial Masyarakat Kampung Gayo Murni**

Secara umum, kedatangan etnis Jawa ke Kampung Gayo Murni berbarengan dengan program transmigrasi yang digalakkan pemerintah Orde Baru pada

dekade 1970-1980-an. Para transmigran yang ikut serta dalam program tersebut tentu saja harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1973 tentang penyelenggaraan transmigrasi yang menyebutkan bahwa untuk menjadi transmigran, wajib memenuhi syarat-syarat: warga negara Indonesia, berkelakuan baik, berbadan sehat, sukarela, mempunyai kemampuan dan keterampilan kerja, serta tunduk dan patuh pada peraturan penyelenggaraan transmigrasi (Nurul Fitri, 2014:58).

Untuk wilayah Atu Lintang, program transmigrasi terdiri dari dua gelombang utama, yakni gelombang I pada tahun 1981/1982 dan gelombang II pada tahun 1995/1996. Khusus untuk gelombang I, para transmigran dari Jawa tiba di Atu Lintang pada tanggal 24 Februari 1982. Hingga saat ini, setiap tanggal tersebut masih diperingati oleh para transmigran sebagai hari istimewa dengan mengadakan berbagai macam karnaval dan pertunjukan seni. Peringatan ini diadakan di pusat Kecamatan Atu Lintang dan didanai oleh para transmigran dengan sukarela, namun ada pula sumbangan dari pemerintah dan tokoh-tokoh elit setempat (wawancara dengan Sumarto Ngatun, 9 Mei 2016).

Jumlah mereka pada setiap gelombangnya berbeda. Pada Gelombang I, jumlah keseluruhan peserta transmigran adalah 200 KK yang terdiri dari 902 jiwa. Sedangkan pada Gelombang II, jumlah mereka meningkat menjadi 365 KK yang terdiri dari 1337 jiwa (Nurul Fitri, 2014:60).

Pembagian lahan pada proses penempatan para transmigran tersebut,



diadakan melalui sistem undian. Jatah lahan yang akan ditempati sudah memiliki nomor undi masing-masing, dan tiap-tiap KK diminta untuk mencabut nomor undian yang disediakan oleh panitia. Setelah itu, barulah ditetapkan kepemilikan masing-masing. Mereka diberikan dana subsidi dan bantuan makanan pokok oleh pemerintah selama kurang lebih tiga tahun (wawancara dengan Mardiyanto dan Musikan, 9 Mei 2016).

Sementara itu, proses kedatangan orang Aceh ke Kampung Gayo Murni dapat dikatakan tidak terstruktur dan bersifat spontan. Ini disebabkan karena dalam adat Aceh dikenal adanya istilah perantauan. Konsep perantauan di kalangan orang Aceh memiliki beberapa perbedaan yang didasarkan pada tujuan rantau. Perantauan dengan maksud berdagang disebut *jak naniaga* (*pergi berniaga*), dan kalau untuk bersekolah dikatakan *jak meudagang* (*pergi bermagang*). Sedangkan perantauan dengan tujuan bertani disebut *jak seumuga* (*pergi bertanam*). Sebutan lain lagi untuk perantauan adalah *bungka* (Bambang Suwondo, dkk, 1982:35-36).

Meskipun demikian, mayoritas orang Aceh yang datang ke Kampung Gayo Murni bertujuan untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik. Diperkirakan mereka telah datang sekitar awal tahun 1970-an. Jumlah mereka tidak banyak dan berasal dari berbagai daerah seperti Pidie, Aceh Barat, dan Aceh Timur. Beberapa di antara pendatang tersebut ada yang menikah dengan penduduk setempat dan ada juga yang membawa serta keluarganya dari daerah asal (wawancara dengan Zainal Abidin, 7 Mei 2016).

Hal pertama yang paling penting untuk diperhatikan dalam interaksi sosial antar etnis yang berbeda adalah penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Biasanya Bahasa Indonesia adalah prioritas utama yang dipilih oleh masing-masing etnis berbeda untuk saling berhubungan, tetapi di Kampung Gayo Murni, bahasa Gayo juga menjadi alternatif lain.

Penggunaan bahasa Gayo di dalam hubungan antar etnis ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal. Lamanya seseorang berada di lingkungan orang Gayo ternyata bukan satu-satunya sebab penguasaan bahasa Gayo oleh orang yang berasal dari etnis lain, khususnya Jawa, karena masih terdapat orang yang meskipun sudah sejak lama berada di daerah Aceh Tengah, namun penguasaan bahasa Gayo mereka masih kurang sekali (Harjono, 1978:19).

Di kampung Gayo Murni, jika dibandingkan penguasaan bahasa Gayo antara etnis Jawa dan etnis Aceh, etnis Jawa cenderung lebih cepat dan lebih baik dalam penguasaan bahasa Gayo. Ini dikarenakan sifat pergaulan mereka jauh lebih terbuka. Sedangkan etnis Aceh, meskipun jumlahnya tidak begitu banyak, dapat dikatakan masih tertutup dan bertahan dengan budayanya sendiri, sebab di dalam kehidupan sehari-hari masih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi.

Meskipun demikian, bahasa memang tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan dalam menentukan pola interaksi antar etnis yang terjadi di Kampung Gayo Murni. Selebihnya orang Aceh yang ada di Kampung Gayo Murni memang sudah berkeluarga sebelum menempati kampung tersebut. Lain halnya dengan sekarang, yang





mana perkawinan lintas etnis sudah dianggap sebagai proses sosial yang normal dan menjadi salah satu bentuk interaksi yang wajar (wawancara dengan Zainal Abidin, 7 Mei 2016).

Profesi yang paling dominan digeluti oleh masyarakat di Kampung Gayo Murni ada di bidang pertanian, khususnya lagi petani kopi. Jika dipersentasikan, maka lebih dari 80% dari jumlah keseluruhan masyarakat yang ada di kampung tersebut memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian. Selebihnya yang 20% lagi adalah pedagang, PNS, dan wiraswasta. Jumlah ini tidak hanya berlaku bagi etnis tertentu, sebab baik itu orang Gayo, Aceh dan Jawa, masing-masing mengambil peran di dalamnya.

Sistem pertanian orang Gayo di Kampung Gayo Murni hampir sama dengan orang Jawa. Mereka telah menempati kampung itu terlebih dahulu, jadi tanah yang ada di sana memang milik pribadi yang didapatkan dari hasil warisan atau jual-beli dengan pemilik sebelumnya. Dalam bertani pun, orang Gayo telah menjadi pemula dan pada masa-masa awal kedatangan para transmigran, mereka sempat menjadi penyedia lapangan kerja bagi orang Jawa yang masih hidup menumpang di rumah-rumah penduduk setempat (wawancara dengan Zainal Abidin, 7 Mei 2016).

Berbeda dengan kedua etnis sebelumnya, mayoritas orang Aceh di Kampung Gayo Murni berprofesi sebagai pedagang. Ada juga yang bekerja sebagai petani, tetapi umumnya mereka berasal dari wilayah Aceh Barat. Sampai akhir tahun 1999, orang Aceh yang menjadi petani tercatat ada sekitar 5 KK. Selebihnya adalah pedagang yang membuka kios dan grosir,

warung makan, PNS, serta tauke kopi. Salah satu orang Aceh yang menjadi tauke terkenal di Kampung Gayo Murni adalah Abu Abbas. Dia masih bertahan dengan bisnisnya tersebut sampai konflik mencapai puncaknya sekitar tahun 2003 s.d. 2005 (wawancara dengan Zainal Abidin, 7 Mei 2016).

Ada beberapa poin menarik dari kehidupan ekonomi masyarakat di Kampung Gayo Murni. Pertama adalah tentang perbedaan kedisiplinan antara orang Jawa dan orang Gayo dalam bekerja di kebun, dan tentang pengaruh kedatangan orang Aceh di kampung tersebut. Jika dilakukan sebuah komparasi, tingkat kedisiplinan kerja orang Jawa dalam berkebun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang Gayo. Ini dapat terlihat dari jam kerja dan hasil yang diperoleh. Kebanyakan orang Jawa memulai pekerjaan di kebun sekitar jam 07:00 WIB, sedangkan orang Gayo baru memulainya sekitar satu sampai dua jam kemudian. Secara keseluruhan hal ini memang tidak memengaruhi hasil panen kopi, tetapi dapat dilihat bahwa banyak orang Jawa yang ada di Kampung Gayo Murni sudah bisa membangun rumah yang lebih besar dibandingkan dengan orang Gayo, meskipun mereka baru menempati kampung tersebut belakangan (wawancara dengan Zainal Abidin, 7 Mei 2016).

Poin menarik selanjutnya adalah perihal kedatangan dan keberadaan orang Aceh di kampung tersebut. Dapat dikatakan bahwa orang Aceh adalah salah satu pendongkrak ekonomi di Kampung Gayo Murni. Dengan adanya grosir dan kios milik mereka, masyarakat tidak perlu lagi belanja ke pusat kecamatan atau ke kampung sebelah. Di samping itu, pada masa pra-



konflik, yang memegang bisnis jual beli kopi di kampung tersebut juga orang Aceh. Ini menandakan bahwa secara tidak langsung usaha yang dikelola oleh orang Aceh turut menyumbang kemajuan dan tingkat perekonomian di Kampung Gayo Murni.

Sebelum tahun 2002, Kampung Gayo Murni masih menjadi bagian dari Kampung Meurah Mueyang, hal yang paling menonjol adalah penggunaan istilah untuk menyebut aparatur pemerintahan kampung. Pada saat itu istilah Sarak Opat yang menjadi ciri khas dalam sistem pemerintahan masyarakat Gayo secara turun-temurun, sama sekali tidak digunakan, sebab pengaruh Jawa sangat kental di daerah tersebut. Setelah tahun 2002, Kampung Gayo Murni sudah berdiri sendiri, semua istilah yang berbau Jawa itu diganti. Kata-kata yang diganti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| Istilah Umum    | Sebelum Tahun 2002  | Sesudah Tahun 2002 |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| Kepala Desa     | Kepala Desa (Kades) | Reje Kampung       |
| Sekretaris Desa | Carik               | Banta              |
| Kepala Dusun    | Polo                | Penghulu           |
| Kepala Urusan   | Ulu-ulu             | Kejurun            |

(Sumber: wawancara dengan Saladin, 7 Mei 2016)

Dari tabel di atas jelas sekali terlihat adanya upaya melakukan revitalisasi sistem politik masyarakat Gayo di Kampung Gayo Murni. Tetapi istilah tersebut baru digunakan secara resmi pada tahun 2011 berdasarkan Qanun Pemerintah Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung.

Meskipun istilah Jawa dalam aparatur kampung pernah digunakan sejak lama, pada kenyataannya sejak Kampung Gayo Murni berdiri, belum ada orang Jawa yang

menduduki posisi penting seperti kepala desa dan sekretaris desa. Ini berhubungan dengan tingkat pendidikan para transmigran yang mayoritas hanya tamatan SD dan SMP. (wawancara dengan Mardiyanto, 9 Mei 2016).

Sementara itu peran dan partisipasi etnis Aceh dalam sistem pemerintahan di Kampung Gayo Murni dapat dikatakan lebih minim lagi. Ini berkaitan erat dengan profesi yang digeluti oleh mayoritas orang Aceh, yakni sebagai pedagang dan PNS. Dengan demikian, kedudukan dan posisi penting dalam sistem pemerintahan di kampung tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada orang Gayo.

### **Akar Konflik Antar Etnis Jawa dan Etnis Aceh di Kampung Gayo Murni**

Pada dasarnya, konflik yang terjadi antara etnik adalah gejala yang sangat tipikal dari relasi antarmanusia (human relationship) yang terjadi pada setiap level, mulai dari level psikologis hingga level global. Konflik tersebut umumnya berlaku antara etnis mayoritas dan minoritas, meskipun diwarnai oleh faktor-faktor kultural dan struktural (Alo Liliweri, 2005: 252). Dalam kasus di Kampung Gayo Murni, konflik yang terjadi memang tidak terlepas dari sisi kultural dan struktural. Agar lebih sistematis, penulis akan membagi faktor-faktor yang memicu meletusnya konflik tersebut ke dalam dua kategori, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

Sebelum konflik antara pemerintah RI dan GAM menyebar secara menyeluruh di daerah Aceh, kehidupan masyarakat di Kampung Gayo Murni pada umumnya masih harmonis. Baik dari segi kegiatan ekonomi



atau interaksi sosial antara sesama kelompok masyarakat, sama sekali belum mengalami gangguan yang dapat berakibat fatal. Perubahan yang signifikan terjadi ketika Aceh ditetapkan oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai wilayah darurat militer pada tanggal 19 Mei 2003 melalui Keppres RI Nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal tersebut menandai awal mula keadaan yang lebih genting untuk sebagian besar masyarakat yang menetap di Provinsi Aceh, termasuk yang berada di Kampung Gayo Murni.

Memang pada tahun 1989 pemerintah juga telah memperlakukan status Daerah Operasi Militer di Aceh, yang bertujuan untuk mengamankan situasi dari tindakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang selanjutnya disebut pemerintah dengan istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), melalui Operasi Jaring Merah (Nur Alamsyah dan Hendra dalam Al Chaidar, dkk., 1999: 107). Tetapi hal itu tidak terbukti memiliki akibat langsung dalam mengusik keamanan di Kampung Gayo Murni, sebab masyarakat di kampung tersebut masih dalam tahap pembangunan dengan kehadiran para transmigran.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konflik vertikal yang terjadi antara Pemerintah RI dan gerakan separatis GAM baru berpengaruh langsung terhadap pola kehidupan di Kampung Gayo Murni ketika status DOM diberlakukan pada tahun 2003. Efek dari penetapan status darurat militer tersebut adalah ditempatkannya pos militer di berbagai titik strategis, salah satunya adalah

di Kampung Meurah Mege yang letaknya tidak jauh dari Kampung Gayo Murni (wawancara dengan Edi Suharman, 9 Mei 2016).

Penempatan pasukan militer ini juga berpengaruh kepada masyarakat sipil. Salah satunya adalah dibentuknya beberapa front perlawanan rakyat atau milisi. Tujuan awal pembentukan milisi ini pada dasarnya untuk melindungi rakyat yang cemas dan ketakutan (Ruslan Jusuf, <http://kompasiana.com/ruslan./peran-milisi-di-masa-konflik-aceh-1976-2005/>, diakses 10 Mei 2016 pukul 20:37 WIB). Untuk wilayah Aceh Tengah, ada dua kelompok milisi terorganisir yang paling besar dan berpengaruh luas, yakni Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG) di bawah pimpinan Syukur Kobath dan Pembela Tanah Air (PETA) di bawah pimpinan Tagore Abu Bakar. Meskipun kedua pimpinan kelompok milisi tersebut adalah orang Gayo totok, namun untuk wilayah Kampung Gayo Murni dan sekitarnya, yang diketahui sebagai anggota milisi hampir seluruhnya adalah orang Jawa (wawancara dengan Saladin, 7 Mei 2016).

Menyebarnya pengaruh milisi ke kampung-kampung menimbulkan berbagai macam reaksi. Bagi etnis Jawa, hal tersebut adalah kesempatan besar untuk dapat berpartisipasi dalam memberantas pergerakan organisasi separatis GAM. Sedangkan bagi etnis Aceh tentu saja merasa dirugikan sebab posisinya yang terancam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya kerja sama antara milisi dan masyarakat di kampung-kampung, khususnya Kampung Gayo Murni, maka konflik yang pada mulanya bersifat struktural





antara pemerintah yang berkuasa dan aliansi penentangannya, berubah menjadi konflik kultural yang melibatkan etnis berbeda di daerah tersebut.

Sarlito Wirawan Sarwono (2006: 48) menyatakan bahwa menurut hasil penelitian di berbagai tempat dalam waktu yang berbeda, satu hal yang selalu muncul ketika terjadi konflik antara etnis di Indonesia adalah prasangka etnis yang selalu bersifat kontekstual, artinya setiap konflik selalu terkait dengan situasi dan kondisi tertentu. Jika dikaitkan dengan konflik yang terjadi di Kampung Gayo Murni, pernyataan tersebut sangat sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Konflik yang terjadi antara etnis Jawa dan etnis Aceh di kampung tersebut adalah imbas dari situasi yang sedang kacau hampir di seluruh wilayah Aceh.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri, ada hal lain yang memicu konflik di Kampung Gayo Murni, yang mana berasal dari kehidupan masyarakat setempat. Memang jika dilihat dari segi kehidupan ekonomi, tingkat kesejahteraan orang Aceh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan etnis lain yang mendiami kampung tersebut. Meskipun tidak berlaku secara keseluruhan, untuk ukuran kehidupan di kampung, hal ini adalah salah satu pemicu munculnya prasangka buruk (*su'uzon*) dan dengki antara sesama, yang mana hanya menunggu waktu yang tepat untuk mencuat ke permukaan (wawancara dengan Saladin, 7 Mei 2016).

Hal lain yang menjadi masalah yang berkaitan langsung dengan konflik adalah munculnya rasa chauvinisme (mencintai suku bangsa sendiri dengan cara yang berlebihan) dari masing-masing etnis, yang mana hal tersebut sangat rentan terjadi di tengah-

tengah konflik antar etnis. Pada kenyataannya, etnis Jawa menganggap semua orang Aceh mempunyai hubungan dengan GAM yang menjadi biang keladi kerusuhan, sedangkan etnis Aceh menganggap orang Jawa sebagai pendatang yang merugikan sehingga dari kedua hal tersebut muncul kebencian secara kolektif. Selain itu, hal yang tidak bisa dihindari dan turut memperkeruh suasana adalah sebuah pernyataan dari pihak milisi yang sangat terkenal pada waktu itu dengan menyinggung isu SARA yang amat sensitif dan bersifat diskriminatif, yakni: “Aceh Tengah (termasuk juga Bener Meriah dan Gayo Lues), bukanlah daerah perjuangan bagi orang Aceh” (wawancara dengan Saladin, 7 Mei 2016).

### **Proses Terjadinya Konflik Antara Etnis Jawa dan Etnis Aceh di Kampung Gayo Murni**

Konflik yang terjadi di Kampung Gayo Murni, adalah salah satu konflik yang paling besar dan berpengaruh jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Aceh Tengah. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Atu Lintang adalah basis utama bagi etnis Jawa, baik yang datang melalui program transmigrasi yang dikelola oleh pemerintah atau secara mandiri.

Agar lebih memudahkan proses penyusunan, penulis membagi konflik tersebut ke dalam dua periode, yang mana masing-masing mewakili rentang waktu dan esensi dari konflik tersebut. Ada pun yang menjadi pemisah antara dua periode yang dimaksud adalah proses konsiliasi atau perdamaian antara pihak RI dan GAM yang dilaksanakan di Helsinki pada tahun 2005.



Satu hal yang perlu dicatat pada periode pertama adalah konflik yang terjadi merupakan sebuah kajian mikroskopis sosial atau sejarah mikro yang merupakan bagian kecil dari fenomena besar yang sedang terjadi dan dalam beberapa peristiwa kemungkinan memiliki akar permasalahan yang serupa. Tentang pengertian dari kajian tersebut, Peter Burke (2003: 55-63) menjelaskan bahwa sejarah mikro merupakan sebuah tren dalam kajian yang memberi perhatian pada analisis sosial mikro. Atau dalam pengertian yang lebih sederhana, sejarah mikro dapat diartikan sebagai kajian sejarah yang memberi perhatian pada unit analisis yang sempit, seperti peristiwa tertentu, komunitas di pedesaan, serta keluarga dan individu.

Dalam kasus di Kampung Gayo Murni, serangkaian peristiwa yang terjadi tidak terlepas dari konflik besar yang sedang berlangsung selama Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengaruh kehadiran militer dan campur tangan milisi memiliki andil yang sangat besar. Untuk Kampung Gayo Murni sendiri, dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai tahun 2005, tercatat enam kasus pembakaran rumah, dua kasus penganiayaan yang melibatkan warga setempat dan dua orang dinyatakan hilang tanpa jejak (wawancara dengan Saladin, 9 Mei 2016, dan Usman Arfi, 9 Mei 2016).

Kasus pembakaran rumah yang pertama, terjadi pada penghujung tahun 2003. Saat itu situasi di Kampung Gayo Murni dapat dikatakan tidak kohesif dan sudah masuk ke dalam daftar dawat ilang (istilah dalam bahasa Gayo yang artinya

adalah tinta merah. Istilah itu digunakan untuk menyebut kampung-kampung yang berpotensi besar sebagai wadah terjadinya kerusuhan).

Tujuan kedatangan kelompok orang tak dikenal itu adalah untuk menanyakan letak rumah Sumardi alias Pak Tangkas, seorang antek milisi. Namun para pemuda tersebut menolak untuk memberitahu, sehingga terjadilah pertengkaran dengan adu mulut dan saling ancam antara kedua belah pihak. Kebetulan pada saat itu di depan rumah korban terdapat satu drum bensin. Salah satu dari orang tak dikenal itu menendangnya sampai tumpah ke berada rumah korban yang terbuat dari papan. Pada saat itu, mereka menyalakan korek dan dengan cepat api menyebar. Karena panik, orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu tidak sempat menahan para pelaku yang sudah melarikan diri. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi kerugian yang diterima oleh keluarga Suwanto ditaksir sangat besar, karena rumahnya ludes terbakar api (wawancara dengan Saladin, 7 Mei 2016, dan Boniyem [Istri Suwanto], 9 Mei 2016).

Insiden tersebut memang bukan yang paling besar, namun berawal dari sana, beberapa kasus kebakaran rumah kembali terjadi. Hal tersebut juga menyebabkan munculnya prasangka buruk terhadap sesama warga di Kampung Gayo Murni, yang mana imbasnya dirasakan oleh orang Aceh yang dicurigai dan dituduh memiliki hubungan dengan anggota GAM.

Kasus kebakaran rumah yang kedua berselang sekitar satu minggu dari yang pertama. Peristiwa ini seiring dengan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal terhadap



pemilik rumah yang merupakan dua orang Aceh perantauan yang masih melajang, yakni Safrijal dan Hudri. Rumah mereka adalah sebuah kios yang menjual barang-barang sembako. Peristiwa naas itu terjadi sekitar tengah malam. Korban didatangi oleh beberapa orang yang memakai topeng sebo karena dituduh memberikan bantuan kepada GAM. Insiden kedua tersebut memiliki pengaruh yang amat besar bagi kehidupan sosial dan goncangan psikologis bagi masyarakat di Kampung Gayo Murni. Banyak orang Aceh yang sudah menetap lama, memutuskan untuk melakukan eksodus besar-besaran demi mencari suaka ke rumah kerabatnya di kampung lain. Di samping itu, ada juga beberapa keluarga orang Gayo dan sedikit keluarga orang Jawa yang juga memilih untuk meninggalkan kampung tersebut untuk sementara waktu. Hal itu mengakibatkan banyak rumah yang kosong karena tidak ada penghuni, sehingga beberapa dari keluarga yang melakukan pelarian itu, harus menjadi korban saat rumah mereka dibakar.

Setelah banyak warga yang pergi dari Kampung Gayo Murni, tercatat ada empat kasus pembakaran rumah lagi dalam kurun waktu Februari sampai Juli 2004. Rumah yang pertama adalah milik keluarga seorang tauke kopi yang bernama Abu Abbas, milik keluarga warung makan yang bernama Bakar A. A., lalu dua rumah lagi adalah milik keluarga Andi dan M. Nasir yang bekerja sebagai petani. Faktanya, tiga dari empat pemilik rumah tersebut adalah orang Aceh, kecuali Bapak Andi yang merupakan orang Gayo. Di samping itu, tiga insiden kebakaran terjadi pada malam hari, kecuali rumah milik Andi yang terjadi sekitar jam 14:00 WIB

(wawancara dengan Saladin, 7 Mei 2016, Zainal Abidin, 9 Mei 2016, dan Edi Suharman, 9 Mei 2016).

Selain pembakaran rumah, kasus lain yang menyita perhatian adalah hilangnya dua warga Kampung Gayo Murni yang diduga menjadi korban penculikan. Korban yang pertama adalah Jamaludin, seorang marbut meunasah di Dusun Sari Murni, salah satu dusun di kampung tersebut. Korban diperkirakan menghilang pada bulan April 2004 setelah salat isya. Pada saat itu dia berusia sekitar 24 s.d. 25 tahun dan masih melajang. Hingga saat ini masih belum ada kejelasan tentang kronologi hilang dan motif khususnya, tapi dapat dipastikan bahwa pelakunya lebih dari satu orang. Hal itu terbukti dari jejak yang ditinggalkan di rumah korban.

Warga menyadari hilangnya Jamaludin saat waktu subuh. Biasanya korban selalu menjadi muazin di meunasah tersebut, namun pada saat itu suara azan tidak terdengar, sehingga timbul kecurigaan warga bahwa peristiwa tidak menyenangkan telah terjadi. Hal itu membuat Reje Kampung, yang saat itu dijabat oleh Saladin, memerintahkan kepada segenap warga untuk mencari korban. Pencarian dilakukan selama dua hari dengan hasil yang nihil. Namun yang meyakinkan warga bahwa korban tidak pergi dengan kehendak sendiri, tetapi dijemput paksa oleh oknum tertentu, adalah keadaan rumah korban ditinggalkan dalam tidak terkunci dan berantakan. Pihak keluarganya yang berada di kampung lain juga sudah mengkonfirmasi bahwa korban tidak berada bersama mereka. Sampai sekarang, keberadaan Jamaludin masih belum diketahui dengan pasti.



Korban yang selanjutnya adalah M. Nasir. Diperkirakan korban hilang sekitar bulan Juni 2004 sekitar pukul 10:00 WIB. Di samping itu, rumahnya juga terbakar saat keluarganya memutuskan untuk meninggalkan Kampung Gayo Murni. Saat penculikan terjadi, usia korban bekisar antara 39 s.d 40 tahun dan meninggalkan seorang istri beserta tiga orang putra.

Kasus penculikan M. Nasir berbeda dengan Jamaludin. Sebelumnya telah diketahui bahwa korban dicurigai oleh kelompok milisi sebagai A1 (istilah untuk menyebut anggota GAM atau orang terlibat dengan organisasi tersebut). Dapat dipastikan, hilangnya korban tidak terlepas dari campur tangan anggota militer, khususnya Pasukan Rajawali yang bermarkas di pos Kampung Meurah Mege.

Kronologi peristiwanya bermula ketika korban kembali ke Kampung Gayo Murni setelah meninggalkan kampung tersebut. Alasannya adalah untuk melihat kebun kopinya yang tertinggal. Malam sebelum menghilang, dia menginap di rumah Reje Kampung. Pada malam itu mereka merasa sedang dikepung dan diawasi oleh orang tak dikenal. Reje Kampung meminta kepada korban agar besok pagi langsung pergi meninggalkan kampung. Namun korban tidak mendengarkan permintaan itu dan justru kembali lagi ke kebun.

Tidak lama setelah itu, Reje Kampung mendengar informasi bahwa M. Nasir telah dibawa ke pos militer oleh beberapa orang. Untuk memastikan hal tersebut, dia pergi ke tempat itu. Namun pihak militer tidak mengakui dan malah menuduh Reje Kampung melindungi seseorang yang diduga keras sebagai A1, sehingga beberapa orang

tentara diutus untuk menggeledah rumah Reje dengan dalih mencari barang bukti yang berupa senjata. Meskipun Reje Kampung terbebas dari tuduhan, namun diyakini ada peran warga Kampung Gayo Murni sendiri dalam kasus ini dengan menjadi mata-mata bagi tentara. Imbasnya, hingga saat ini keberadaan M. Nasir tidak juga diketahui (wawancara dengan Saladin, 7 Mei 2016, Zainal Abidin, 9 Mei 2016, dan Edi Suharman, 9 Mei 2016).

Dari keseluruhan kasus tersebut di atas, terlihat sangat jelas bahwa insiden yang terjadi lebih condong kepada konflik yang berkaitan dengan Etnis Jawa dan Etnis Aceh. Meskipun pada kurun waktu tersebut, pemerintah telah memberikan himbauan kepada tiap-tiap kampung agar mewajibkan seluruh pria yang telah cukup umur untuk mengikuti ronda dan jaga malam di gardu yang ada di setiap dusun, namun hal tersebut terbukti tidak mampu untuk mencegah terjadinya ancaman yang mengganggu keamanan.

Satu lagi yang perlu dicatat adalah minimnya pemberitaan media pada kasus-kasus tersebut atau berdasarkan fakta yang lebih konkrit lagi bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini tentu saja wajar, mengingat banyaknya peristiwa serupa yang terjadi di tempat lain seiring dengan diberlakukannya status DOM pada Provinsi Aceh (waktu itu masih Nanggroe Aceh Darussalam). Sehingga sangat koheren jika dikatakan bahwa konflik yang terjadi di Kampung Gayo Murni pada periode sebelum perdamaian adalah kajian yang menyangkut ranah mikroskopis sejarah.

Konflik bersenjata yang terjadi antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia



telah banyak mengubah pola kehidupan masyarakat di Aceh. Pertikaian itu baru berakhir setelah ditandatanganinya MoU Helsinki tanggal 5 Agustus 2005. Untuk mendukung proses perdamaian, pihak yang terkait melakukan berbagai upaya agar masyarakat memberikan apresiasi penuh. Salah satu alternatif bagi orang-orang yang mendukung perdamaian dan terlibat langsung dalam proses rekonstruksi Aceh tersebut, memilih untuk menjadi anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) (Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, 2011: 280).

KPA sendiri adalah organisasi yang didirikan oleh para mantan anggota GAM sebagai bentuk aspirasi dari perdamaian dan dideklarasikan pada tanggal 27 Desember 2005 di Banda Aceh. Tujuan dasar dibentuknya organisasi ini adalah untuk menjaga kendali dan data atau sumber informasi yang berkaitan dengan seluruh mantan kombatan GAM. Salah satu fungsi terpentingnya yaitu sebagai alat pemersatu perjuangan politik rakyat Aceh dan bertugas untuk mewujudkan cita-cita MoU Helsinki, serta mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan bagi rakyat Aceh. Pengurus KPA terdiri dari panglima-panglima GAM, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan (Arsil, 2014: 30).

Untuk wilayah Kecamatan Atu Lintang, kantor KPA terletak di Kampung Meurah Mege. Meskipun kampung tersebut tidak berbatasan langsung dengan Kampung Gayo Murni, faktanya kehadiran kantor KPA masih memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat. Oleh karena itu, puncak konflik yang terjadi pasca perdamaian sebenarnya lebih bersifat universal dan tidak hanya mencakup pada satu kampung saja.

Pada masa-masa awal perdamaian, khusus di Kampung Gayo Murni konsistensi antara masyarakat lintas etnis masih terjalin demi menjaga kerukunan. Hal itu terbukti, sebab mulai tahun 2005 hingga tahun 2008, tidak ditemukan adanya konflik yang melibatkan warga setempat, baik dalam bentuk personal maupun kolektif. Namun di tengah keharmonisan tersebut, pada bulan Maret 2008, masyarakat kembali digemparkan dengan suatu insiden yang mengoyak perdamaian. Peristiwa itu dikenal dengan sebutan Tragedi Atu Lintang.

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Kepolisian Resor Aceh Tengah Ajun Komisaris Besar AB Kawedar, kejadiannya murni kriminal. Sebab masalahnya diawali dengan perselisihan soal lahan parkir antara anggota KPA dengan anggota milisi PETA dan organisasi pengelola terminal yang dikuasai milisi (Win Ruhdi Batin, <http://pantau.or.id/>, diakses 12 Mei 2016 pukul 14:52 WIB). Namun menurut LSM seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), peristiwa tersebut merupakan eksekusi dari pembiaran konflik horizontal yang telah berlangsung lama di Aceh Tengah. Sedangkan pernyataan pihak-pihak yang menyimpulkan modus dari peristiwa ini dari berbagai sisi, dipandang hanya sebagai salah satu bentuk upaya agar masyarakat dan oknum tertentu tidak terprovokasi. Karena harus dipahami, Aceh merupakan daerah yang baru reda dari konflik politik panjang (KontraS, “Peristiwa Penyerangan dan Pembakaran di Atu Lintang”. <http://kontras.org/>, diakses 17 Mei 2016 pukul 19:52 WIB).





Dalam skala dan gradasi yang berbeda, peristiwa seperti ini berulang kali terjadi saat konflik Aceh dan tidak mungkin berdiri sendiri atau muncul secara spontan. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan dari masyarakat setempat, sebenarnya insiden itu masih berkaitan dengan prasangka antar etnis pasca perdamaian.

Ditematkannya kantor KPA di Kampung Meurah Mege, pada awalnya bukanlah masalah bagi warga. Namun lama-kelamaan timbul keresahan yang disebabkan karena tingkah para anggota KPA yang sewenang-wenang. Mereka bertindak melebihi batas karena sering melakukan pemerasan dan meminjam uang koperasi Sinar Harapan, tanpa membayarnya. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu pembantaian terhadap anggota KPA, karena warga sudah sampai di puncak kebencian dan amarah. Sedangkan isu perebutan lahan parkir hanya sebagai pemancing untuk melakukan tindakan yang lebih anarkis. Oleh karena itu, ada juga anggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa KPA tidak lain merupakan penjelmaan dari GAM (wawancara dengan Abdul Basith, 12 Mei 2016, dan Saladin, 7 Mei 2016).

Peristiwa pembantaian di Atu Lintang mau tidak mau harus diletakkan dalam konteks demikian. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Lokasi yang jadi sasaran hanya 150 meter dari kantor Polsek dan lebih kurang 250 meter dari Koramil. Bagi banyak orang, sulit membayangkan warga biasa di pedesaan mempunyai keberanian menyerang markas organisasi eks-combattan. Kecuali jika ada kekuatan besar di belakang mereka dan memahami seluk-beluk pertempuran. Lagi pula,

pengerahan ratusan massa di daerah pedesaan yang relatif sepi dan gelap gulita pada malam hari membutuhkan waktu, perencanaan, dan persiapan yang matang. Prosesnya tidak spontan dan mendahului kasus perebutan wilayah parkir belaka (Maruli Tobing, [www.unisosdem.org](http://www.unisosdem.org), diakses 17 Mei 2016 pukul 20:03 WIB).

Lima anggota KPA yang sedang berada di kantor tewas sangat mengenaskan. Empat di antaranya tewas terpenggang setelah sebelumnya dibacok, yaitu Ramlan, Hasbi Gadeng, Selamat, dan Sabri dan satu lagi yang diceburkan ke dalam sumur adalah Sejahtera Putra. Sedangkan satu orang yang berhasil melarikan diri adalah Syahbandar (Anonim. "Lima Tersangka Insiden Atu Lintang Ditangkap". Serambi Indonesia. 6 Maret 2008).

Kasus tersebut adalah insiden pertama yang mencoreng perdamaian di Aceh, sehingga tidak hanya menggegerkan warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian dan Aceh Tengah saja. Banyak wartawan dari media cetak dan elektronik datang ke lokasi untuk meliputnya. Bukan hanya dari media lokal dan nasional, wartawan dari stasiun TV asing Al Jazeera juga ada di sana. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung memerintahkan polisi agar mengusutnya hingga tuntas. Polda Aceh membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tersebut (Anonim. "Tim Khusus Polda Usut Insiden Atu Lintang". Serambi Indonesia. 3 Maret 2008).

Usaha tim khusus Polda bersama dengan jejeran polisi Aceh Tengah, dalam hitungan 2 x 24 jam sejak peristiwa itu terjadi, telah berhasil menangkap lima orang tersangka yang diduga kuat sebagai



dalangnya. Mereka adalah M. Sarjono, Ahmad Zainuddin, Gimam, Musikan, dan Sumardi. Di samping itu, pihak kepolisian juga menginterogasi 40 orang saksi secara maraton, 25 di antaranya juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berasal dari berbagai kampung, seperti Damar Mulyo, Pantan Damar, Atu Lintang, Gayo Murni, dan Meurah Pupuk. (Anonim. "Lima Tersangka Insiden Atu Lintang Ditangkap". *Serambi Indonesia*. 6 Maret 2008).

Tanggapan lain atas kasus tersebut berasal dari sembilan LSM di Banda Aceh yang meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan investigasi langsung ke Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. Hal itu disebabkan mereka mencurigai adanya tindakan pelanggaran HAM yang sistematis. pertimbangan keikutsertaan Komnas HAM diharapkan bisa meredam terjadinya konflik horizontal di wilayah itu (KontraS, "LSM Minta Komnas HAM ke Atu Lintang". <http://kontras.org/>, diakses 17 Mei 2016 pukul 19:52 WIB).

Jika ditilik dari asal etnis para korban dan tersangka, dapat diklasifikasikan bahwa konflik tersebut masih berkaitan dengan konflik antar etnis. Ini dikarenakan tiga dari enam anggota KPA yang menjadi korban adalah orang Aceh. Mereka adalah Hasbi Gadeng, Syahbandar, dan Ramlan. Sedangkan sisanya orang Gayo. Di samping itu, hampir seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut adalah orang Jawa.

Meskipun cakupan wilayah insiden tersebut melingkupi Kecamatan Atu Lintang secara keseluruhan, namun sangat berkaitan dengan Kampung Gayo Murni yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, karena dari

pihak korban dan tersangka, terdapat warga yang berdomisili di kampung tersebut. Hal ini juga dapat menjadi benang merah, bahwa konflik tersebut juga berpengaruh besar kepada pola kehidupan warga di sekitarnya, khususnya di Kampung Gayo Murni.

Akhir dari konflik tersebut, tidak terlepas dari diadakannya konsesus antara pihak yang terlibat. Konsesus artinya kesepakatan suatu kelompok mengenai tujuan, nilai atau pendapat (Jack C. Plano, dkk. 1985:41). Dalam hal ini kelompok yang terlibat relatif kecil atas masalah-masalah yang relatif jelas sehingga prosesnya berjalan lancar. Duski, S. H., penasehat hukum tersangka, ingin pihak yang bertikai menyelesaikannya secara hukum dan adat. Ia menyurati Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Karena jika kasus ini tak diselesaikan dengan baik, maka akan memicu kasus yang lebih buruk, seperti tindak balas dendam antar kelompok maupun etnis. Hal ini akan mengganggu situasi di Aceh pasca konflik.

Di dalam suratnya, Duski, S. H. menawarkan cara menghilangkan dendam dan konflik antar warga atau biasa disebut konflik horizontal itu. Pertama-tama, memberi diyat atau uang ganti rugi kepada ahli waris korban yang meninggal dunia. Besar diyat ditentukan setelah bermusyawarah dengan ahli waris korban. Kedua, kantor KPA dan koperasi yang dibakar dibangun kembali. Ketiga, kepada keluarga tersangka diberikan santunan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), selama tersangka menjalani hukuman.

Tapi surat yang dikirim Duski, S. H. pada Pemda dan DPRK tidak ditanggapi.



Sehingga pada 24 April 2008, 225 warga Kecamatan Atu Lintang yang berasal dari berbagai kampung mendatangi kantor DPRK untuk menyampaikan empat hal, yaitu memohon keringanan hukuman untuk tersangka, meminta Pemda memperhatikan perekonomian tersangka, meminta DPRK memfasilitasi perdamaian dengan keluarga korban, dan menyatakan bahwa pelaku pembakaran Atu Lintang bukan 25 orang melainkan massa, sebab mayoritas tersangkanya adalah remaja di bawah usia 20 tahun (Win Ruhdi Batin, <http://pantau.or.id/>, diakses 12 Mei 2016 pukul 14:52 WIB).

### **Dampak dari Konflik Terhadap Pola Kehidupan Masyarakat di Kampung Gayo Murni**

Konflik antar etnis yang terjadi di Kampung Gayo Murni telah banyak memengaruhi tatanan sosial masyarakat di kampung tersebut. Bergesernya nilai dan norma yang berlaku selama konflik berlangsung adalah pertanda bahwa sifatnya lebih dominan menuju ke arah yang negatif.

Bagi para warga yang merasakan langsung konflik tersebut, memiliki perasaan traumatis yang masih membekas sehingga sebagian besar memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Kampung Gayo Murni. Banyak di antara korban, khususnya orang Aceh dan sebagian kecil orang Gayo, lebih memilih menjual kebun mereka, atau menitipkannya pada seseorang yang bersedia untuk mengelolanya dengan sistem bagi tiga hasil (wawancara dengan Nurdin dan Saladin, 7 Mei 2016).

Pada saat ini, interaksi sosial antara warga di Kampung Gayo Murni memang sudah stabil. Namun berdasarkan data

demografi terakhir, jumlah etnis Aceh yang masih bertahan dan menetap di kampung tersebut hanya tinggal satu KK saja, yaitu keluarga Bapak Sulaiman yang berprofesi sebagai petani kopi. Selain itu, dampak yang paling menonjol setelah berakhirnya konflik adalah semakin menguatnya rasa toleransi antara sesama. Hal itu dikarenakan selama konflik berlangsung, hampir semua orang terjebak dalam perasaan dilematis untuk membela dan mementingkan kelompoknya masing-masing. Namun seiring dengan diadakannya rekonsiliasi yang ditengahi oleh pemerintah setempat, maka rasa persatuan mulai terjalin kembali secara utuh tanpa memandang etnis tertentu.

Bagi warga Kampung Gayo Murni, konflik vertikal yang terjadi antara GAM dan RI yang pada akhirnya membentuk konflik horizontal antara etnis Jawa dan etnis Aceh di kampung tersebut adalah sebuah bencana yang tidak dapat dihindari. Tidak hanya berbentuk *covert conflict* (Soerjono Soekanto, 1999: 86) yang berwujud tersembunyi dalam tindakan-tindakan sabotase, keresahan, ketakutan, dan sebagainya, tetapi telah berkembang ke dalam bentuk yang lebih konkrit dan melibatkan fisik

Hal ini berkaitan dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah yang dikontrol oleh pihak militer, bahwa bagi laki-laki dilarang untuk bekerja di kebun dengan alasan apa pun. Akibatnya, hasil panen kopi dan palawija menjadi berkurang, sedangkan mayoritas warga di kampung tersebut berprofesi sebagai petani (wawancara dengan Mardiyanto, 9 Mei 2016).

Hal itu diperparah lagi dengan harga pasaran kopi dunia pada periode 2000-2004.



Rata-rata pangsa ekspor kopi Indonesia mengalami penurunan (Forum Penelitian Agro Ekonomi, 2007: 44). Dari data tersebut dijelaskan bahwa, pada periode 2000-2004, produksi kopi Indonesia mengalami penurunan dan kalah saing dengan negara Brazil, Kolombia, dan Vietnam. Hal ini menyebabkan harga kopi di pasaran turut menjadi murah, sehingga keadaan para petani di Kampung Gayo Murni juga semakin terdesak. Selain itu, perginya para warga dari Kampung Gayo Murni untuk mencari perlindungan juga turut menjadi penyebab sulitnya perekonomian. Hampir seluruh pedagang dan tauke yang ada di kampung tersebut adalah orang Aceh. Oleh karena itu, tanpa mereka kegiatan ekonomi dan upaya memenuhi kebutuhan bagi warga yang masih tetap tinggal tentu saja semakin sulit karena harus pergi ke kampung lain untuk berbelanja. Oleh sebab itu, konflik yang terjadi tidak hanya menyebabkan rentannya keharmonisan antara etnis yang berbeda, namun telah banyak menyebabkan kerugian dalam bidang ekonomi bagi warga secara keseluruhan.

Secara sederhana, politik artinya adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Namun dalam pengertian yang lebih kompleks, politik adalah upaya untuk mencapai masyarakat yang baik melalui kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya (Miriam Budiardjo, 2008: 13-14). Dengan demikian, sistem pemerintahan desa juga sah dikategorikan sebagai bagian dari politik.

Pada dasarnya, peta perpolitikan internal di Kampung Gayo Murni sebelum dan sesudah konflik tetap didominasi oleh orang Gayo dan orang Jawa. Hal itu bisa

dilihat dalam tabel 4.1 yang sebelumnya sudah dipaparkan. Pada tabel tersebut, diketahui bahwa berdasarkan asal-usul etnis, jumlah aparatur kampung dari kalangan orang Gayo dan orang Jawa dapat dikatakan seimbang, sedangkan orang Aceh tidak mengambil bagian dalam urusan pemerintahan. Di samping itu, salah satu fakta paling unik adalah, posisi petue kampung yang tugasnya mengurus masalah adat istiadat, justru dipegang oleh orang Jawa. Ini menandakan bahwa diferensiasi antar etnis tidak lagi menjadi kendala utama dalam sistem pemerintahan di Kampung Gayo Murni.

Hal tersebut semakin diperkuat setelah diadakan tiga kali pemilihan reje kampung secara demokratis di Kampung Gayo Murni, yaitu pada tahun 2004, 2009, dan 2014. Dalam ketiga pemilihan tersebut, semua calon reje kampung berasal dari etnis Gayo. Setelah calon terpilih menjabat sebagai reje kampung, jika ditilik dari sisi asal-usul etnis para aparatur yang mengelola pemerintahan kampung, jabatan paling dominan dipegang oleh orang Jawa. Salah satu alasannya adalah, setelah konflik berakhir, jumlah orang Jawa di Kampung Gayo Murni tetap menjadi mayoritas. Sebab di samping orang Aceh, banyak orang Gayo yang memilih untuk tidak kembali lagi ke kampung tersebut. Jadi rasio persentase jumlah perbandingan warga di Kampung Gayo Murni untuk saat ini sekitar 65% orang Jawa, 30% orang Gayo, dan di bawah 5% untuk etnis yang lainnya, termasuk orang Aceh (wawancara dengan Nurdin, 7 Mei 2016).

## **KESIMPULAN**



Berdasarkan Sebelum konflik antara Pemerintah RI dan GAM menyebar secara menyeluruh di daerah Aceh, interaksi sosial antara masyarakat di Kampung Gayo Murni masih berjalan dengan harmonis. Selain orang Gayo, di kampung tersebut juga terdapat orang Jawa dan orang Aceh. Awal mula kehadiran kedua etnis yang disebut terakhir memiliki latar belakang yang berbeda. Mayoritas etnis Jawa datang melalui program transmigrasi yang digalakkan pemerintah Orde Baru pada dekade 1970 s.d. 1980-an. Di samping itu, kedatangan etnis Aceh dapat dikatakan tidak terstruktur dan bersifat spontan yang diperkirakan sudah berlangsung sekitar awal tahun 1970-an.

Akar konflik antara etnis Jawa dan etnis Aceh yang berlangsung di Kampung Gayo Murni memiliki dua faktor sebagai berikut ini: *Faktor eksternal* berkaitan dengan keputusan pemerintah yang menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 2003 sehingga muncul konflik vertikal antara RI dan GAM hampir di seluruh Aceh. Dan *Faktor internal* berhubungan dengan prasangka yang muncul antara kedua etnis sehingga memancing timbulnya konflik horizontal antara mereka.

Proses terjadinya konflik antara etnis Jawa dan etnis Aceh di Kampung Gayo memiliki dua periode yang memiliki esensi berbeda. Periode pertama berlangsung pada tahun 2003 s.d. 2005. Adapun kekerasan yang terjadi meliputi enam kasus pembakaran rumah, dua kasus penganiayaan, dan dua kasus penculikan yang melibatkan warga setempat. Sedangkan periode kedua berlangsung pada tahun 2005 s.d. 2008. Kasusnya adalah pembantaian atas lima

orang anggota KPA oleh puluhan warga yang didukung milisi. Mayoritas korban dari kedua periode konflik tersebut berasal dari etnis Aceh.

Konflik yang terjadi antara etnis Jawa dan etnis Aceh di Kampung Gayo Murni memiliki dampak yang berpengaruh kepada pola kehidupan masyarakat setempat. Dalam bidang sosial, banyak warga yang memutuskan untuk meninggalkan kampung tersebut. Namun bagi yang masih tetap bertahan, mencoba dan berusaha untuk membangun kembali kehidupan baru yang lebih baik. Dalam bidang ekonomi, adanya pelarangan bagi petani untuk masuk dan bekerja di kebun telah menyebabkan penurunan jumlah panen. Selain itu, dengan kepergian etnis Aceh, sistem perdagangan juga mengalami kelumpuhan. Namun dalam bidang politik, roda pemerintahan masih berjalan dengan normal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah etnis Gayo dan etnis Jawa memegang jabatan dalam jejeran aparatur kampung masih tetap dominan, baik sesudah maupun sebelum terjadinya konflik

Berdasarkan Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis data penelitian tersebut di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagaimana berikut ini: Untuk mencegah dan menghindari terulangnya proses sosial yang bersifat negatif, Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Tengah harus lebih memperhatikan pola kehidupan masyarakat di wilayah yang pernah dicap sebagai kampung dawat ilang, khususnya di Kampung Gayo Murni yang memiliki keberagaman etnis dalam ruang lingkup multikultural dan sempat menjadi tempat berlangsungnya konflik horizontal





yang melibatkan etnis Jawa dan etnis Aceh di kampung tersebut.

Bagi masyarakat yang terlibat langsung ke dalam konflik antara etnis Jawa dan etnis Aceh di Kampung Gayo Murni, baik sebagai pelaku maupun saksi, diharapkan dapat membangun kembali interaksi sosial yang pernah terusik dan tetap memelihara perdamaian atau konsiliasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak, agar keharmonisan antar sesama dapat terjalin dengan baik dan kontinu.

Kepada pihak civitas akademika Universitas Syiah Kuala, khususnya mahasiswa dan dosen FKIP Sejarah, diharapkan dapat melakukan studi penelitian yang berkaitan dengan kajian mikroskopis sejarah, agar peristiwa penting yang belum pernah diungkapkan dapat muncul ke permukaan sebagai bahan dan informasi tambahan yang dapat menambah wawasan dalam meneliti kehidupan sosial masyarakat di daerah tertentu.

Penelitian ini belum komprehensif, sebab hanya menekankan pada interaksi sosial dan perkembangan masyarakat yang lebih terfokus pada konflik antara etnis di Kampung Gayo Murni, oleh karena itu untuk kebutuhan penelitian berikutnya. Bagi yang berminat meneliti permasalahan serupa diharapkan dapat mengkaji ranah yang lebih luas dan kompleks agar data dan fakta yang diperoleh dapat melebihi ekspektasi semua pihak yang bersangkutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anonim. 2008. *5 Anggota KPA Tewas*. Serambi Indonesia, 2 Maret 2008.

\_\_\_\_\_. 2008. *Tim Khusus Polda Usut Insiden Atu Lintang*. Serambi Indonesia, 3 Maret 2008.

\_\_\_\_\_. 2008. *Lima Tersangka Insiden Atu Lintang Ditangkap*. Serambi Indonesia, 6 Maret 2008.

\_\_\_\_\_. *Peristiwa Penyerangan dan Pembakaran di Atu Lintang*. Diakses 17 Mei 2016 pukul 19:52 WIB. <http://kontras.org/>.

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. 2011. *Acehnologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Arsil. 2014. *Peran Komite Peralihan Aceh dalam Menjaga Perdamaian di Aceh*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Batin, Win Ruhdi. *Ada Apa di Atu Lintang?*. diakses 12 Mei 2016 pukul 14:52 WIB). <http://pantau.or.id/?/=d/493/>.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Burke, Peter. 2003. *Sejarah dan Teori-teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Chaidar, Al, dkk. 1999. *Aceh Bersimbah Darah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Fahmi, Chairul. 2014a. *Jejak Konflik Baru di Aceh*. Banda Aceh: Kesbangpol dan Linmas Provinsi Aceh.



- \_\_\_\_\_. 2014b. *Pemetaan Konflik Sosial Kabupaten Aceh Tengah*. Banda Aceh: Dinas Sosial Provinsi Aceh.
- Fitri, Nurul. 2014. *Perkembangan Pemukiman Transmigrasi di Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah, 1982-2014*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Habib, Achmad. 2004. *Konflik Antar Etnis di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- HAM, Musahadi (Ed). 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan*. Semarang: Walisongo Mediation Centre.
- Harjono. 1978. *Integrasi Sosial Antara Kelompok Etnis Jawa dan Gayo di Aceh Tengah*. Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial.
- Hasbullah. 2014. *Sejarah Konflik, Budaya Politik, dan Ketegangan di Aceh Menjelang Pemilu 2014*. Haba, No. 70: 5.
- Hidayah, Zulyani. 1999. *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Husin, T. A. Hasan. 1980. *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Gayo di Aceh Tengah*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Jusuf, Ruslan. "Peran Milisi di Masa Konflik Aceh 1976-2005". Diakses 10 Mei 2016 pukul 20:37 WIB. <http://kompasiana.com/ruslan./peran-milisi-di-masa-konflik-aceh-1976-2005/>.
- Kamisa. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Koentjaraningrat. 1998. *Pengantar Teori Antropologi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kustiari, Reni. 2007. "Perkembangan Pasar Kopi Dunia dan Implikasinya Bagi Indonesia". *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 25. No. 1: 44.
- Lewis, Bernard. 2009. *Sejarah: Diingat, Ditemukan Kembali, Ditemukan*. Yogyakarta: Ombak.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Plano, Jack C., dkk. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2007. *Psikologi Prasangka Orang Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soekanto, Sarjono. 1999. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.



Suwondo, Bambang, dkk. 1982. *Pengaruh Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tobing, Maruli. “*Geger Atu Lintang dan Musuh Bersama*”. Diakses 17 Mei 2016 pukul 20:03 WIB. [www.unisosdem.org/](http://www.unisosdem.org/).

Wirawan, I.B. 2013. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana.